

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional pada masa kini memungkinkan negara melaksanakan diplomasi publik melalui berbagai instrumen. Program bantuan pembangunan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjalankan diplomasi publik. Pelaksanaan diplomasi pembangunan sebagai bagian dari diplomasi publik melalui pemberian bantuan dan dukungan bagi kesejahteraan dan pembangunan negara-negara berkembang dapat menjadi sarana untuk membangun citra positif dan memperkuat posisi strategis di dalam komunitas internasional.¹ Diplomasi publik yang dilakukan melalui program bantuan pembangunan juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral antarnegara.

Australia merupakan salah satu negara yang menggunakan kerja sama pembangunan sebagai bagian dari keterlibatannya dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Australia, kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki arti strategis karena berkaitan dengan keamanan, stabilitas, kesejahteraan, dan kepentingan nasional Australia.² Oleh karena itu, Australia membangun hubungan dengan negara-negara di kawasan tidak hanya melalui kerja sama politik dan ekonomi, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi Australia untuk membangun hubungan dengan masyarakat di negara mitra sekaligus menunjukkan

¹ Katarzyna Zielińska, "Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations," *Historia i Polityka* 16, no. 23 (2016): 9–26, <https://doi.org/10.12775/hip.2016.009>.

² Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, *2017 Foreign Policy White Paper* (Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade, 2017), 90.

komitmen Australia terhadap berbagai persoalan sosial dan pembangunan.³

Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam diplomasi publik Australia. Kedekatan geografis, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan hubungan bilateral yang berkembang menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis Australia. Diplomasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kebutuhan publik.⁴ Salah satu bentuk keterlibatan Australia tersebut diwujudkan melalui *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* atau Program INKLUSI. Program INKLUSI merupakan bentuk kemitraan antara Australia dan Indonesia yang berfokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak-hak kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta pembangunan masyarakat yang inklusif.⁵ Program INKLUSI melanjutkan kerja sama sebelumnya melalui *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment* atau Program MAMPU yang berlangsung pada tahun 2012–2020.⁶ Peralihan dari MAMPU menuju INKLUSI menunjukkan adanya perkembangan agenda kerja sama Australia dan Indonesia, khususnya dari pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menuju pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dengan memperhatikan berbagai kelompok rentan.⁷ Program INKLUSI relevan dalam

³ Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, "Direct Aid Program," accessed July 29, 2026.

⁴ Sian Troath, "Bonded but Not Embedded: Trust in Australia-Indonesia Relations, Keating & Suharto to Turnbull & Jokowi," *Australian Journal of International Affairs* 73, no. 2 (2019): 126–142

⁵ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society – Investment Design Document," *Department of Foreign Affairs and Trade*, accessed August 2, 2026.

⁶ Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, and Marten Hanura, "Kerja Sama Indonesia–Australia Melalui Program MAMPU," *Journal of International Relations Diponegoro* 8, no. 4 (2022): 705–716,

⁷ Haerani Destiningrum and Witri Elvianti, "Australian Government's Public Diplomacy through the MAMPU Program in Indonesia (2016–2020)," *Jurnal Hubungan Internasional* 16, no. 2 (2023): 492–509,

perspektif diplomasi publik Australia karena melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sebagai penghubung dengan masyarakat Indonesia. Pada tingkat nasional, Australia melalui DFAT bekerja sama dengan BAPPENAS, sementara implementasi program dilakukan melalui organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian yang memiliki jaringan di masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa Australia membangun hubungan tidak hanya melalui saluran diplomatik formal, tetapi juga melalui aktor non-negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat Indonesia.⁸

Dalam diplomasi publik, organisasi masyarakat sipil berperan sebagai penghubung antara Australia dan masyarakat Indonesia. Melalui Program INKLUSI, nilai dan komitmen Australia diterjemahkan ke dalam kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam proses interaksi. Program ini menjadi ruang bagi Australia untuk memperkenalkan komitmennya terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan inklusif. Di Sumatera Barat, Program INKLUSI salah satunya dilaksanakan melalui Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan (LP2M), termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan program ini berkaitan dengan persoalan perempuan, anak, dan kelompok rentan.⁹ Melalui *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) pada 2023, LP2M menemukan persoalan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Nagari Ketaping serta kesenjangan antara data administratif dan kondisi di masyarakat. Selain itu, penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dan komunikasi publik. Kondisi tersebut sejalan dengan

⁸ Nastiti, Panorama, and Ar-Raffi, "Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia melalui AIPTIS," 351–374.

⁹ Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan (LP2M), "Catatan Akhir Tahun 2025 LP2M: Merawat Kolaborasi, Memperkuat Inklusifitas," December 31, 2025.

tujuan INKLUSI dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan inklusif.¹⁰

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, LP2M melaksanakan Program INKLUSI di Padang Pariaman melalui Program Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Perkawinan Usia di Bawah 19 Tahun melalui revitalisasi OSS&L serta Gerakan Keluarga Pembaharu dan Perempuan Akar Rumpun yang Intergenerasional dan Inklusif. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan masyarakat, memperkuat peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.¹¹ Pelaksanaan Program INKLUSI melalui LP2M kemudian dapat dilihat tidak hanya sebagai program pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari praktik diplomasi publik Australia. Australia menggunakan kerja sama pembangunan sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan publik Indonesia melalui aktor masyarakat sipil. Melalui Program INKLUSI, Australia menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, hak penyandang disabilitas, dan pembangunan inklusif.¹²

Diplomasi publik Australia melalui LP2M juga dapat dilihat dari adanya keterlibatan aktor non-negara sebagai perantara dalam hubungan Australia dengan masyarakat Indonesia. LP2M menjadi aktor yang menerjemahkan agenda kerja sama tersebut ke dalam program yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Padang Pariaman. Dengan demikian, hubungan yang dibangun tidak hanya berlangsung pada tingkat

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Felmi Yetti, Direktur Eksekutif LP2M, Padang, 14 April 2026

¹¹ Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan (LP2M), "Catatan Akhir Tahun 2025 LP2M: Merawat Kolaborasi, Memperkuat Inklusifitas," 31 Desember 2025.

¹² Haerani Destiningrum and Witri Elvianti, "Australian Government's Public Diplomacy through the MAMPU Program in Indonesia (2016–2020)," *Jurnal Hubungan Internasional* 16, no. 2 (2023): 492–509

pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil serta masyarakat sebagai publik yang menjadi sasaran dari kegiatan program.¹³ Pola tersebut memperlihatkan bagaimana Australia menggunakan kerja sama pembangunan untuk membangun hubungan dan pemahaman dengan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, Program INKLUSI tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama pembangunan antara Australia dan Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan Australia dalam menjalankan diplomasi publik. Melalui LP2M, Australia berupaya menunjukkan komitmen dan nilai yang dibawanya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan inklusif. Pelaksanaan program melalui LP2M di Padang Pariaman menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana diplomasi publik Australia diterapkan melalui aktor masyarakat sipil dan diwujudkan dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Diplomasi publik saat ini melibatkan berbagai aktor dengan negara sebagai aktor utama di negara target. Salah satunya adalah kerja sama Indonesia–Australia melalui Program *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* (INKLUSI) yang bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil, termasuk LP2M di Sumatera Barat. Keterlibatan Australia mencerminkan komitmennya terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan inklusif dalam agenda kebijakan luar negeri serta bantuan pembangunan internasionalnya. Di

¹³ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society: Investment Design Document* (Canberra: DFAT, 2021).

Kabupaten Padang Pariaman, isu perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, regulasi, dan dampak COVID-19, di sisi lain penyandang disabilitas juga masih menghadapi keterbatasan akses layanan dan komunikasi publik. Menanggapi permasalahan tersebut, Australia melalui LP2M melaksanakan program INKLUSI sebagai upaya penguatan masyarakat sipil dalam menangani isu kesetaraan gender dan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi publik Australia melalui LP2M di Padang Pariaman serta bagaimana program INKLUSI mencerminkan komitmen Australia terhadap pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat ditarik pertanyaan yaitu “Bagaimana diplomasi publik Australia melalui Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) di Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui diplomasi publik Australia melalui Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) di Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan manfaat akademis dengan memperkaya literatur mengenai diplomasi publik Australia, khususnya melalui peran LP2M yang menjalankan program *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* (INKLUSI) dalam konteks hubungan internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang menggunakan konsep

diplomasi publik untuk menganalisis peran negara dalam implementasi program hasil kerjasama bilateral di negara tujuan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan luar negeri dan masyarakat lokal untuk memahami kerjasama pembangunan Indonesia dan Australia melalui LP2M di Padang Pariaman serta menjadi bahan pertimbangan strategis bagi berbagai kota dan provinsi di Indonesia dalam menyikapi dinamika tersebut.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka ini menyajikan tinjauan terhadap literatur relevan yang membahas pembangunan berkelanjutan antara negara maju seperti Australia dan negara berkembang yaitu Indonesia melalui program kerjasama seperti INKLUSI dan lain-lain. Tinjauan ini bertujuan untuk membangun fondasi teoritis dan empiris bagi penelitian, dengan menyoroti perspektif geopolitik, sosial, kebijakan pemerintah dan implikasi global.

Reverensi pertama mengacu pada artikel jurnal berjudul *Australian Government's Public Diplomacy through the MAMPU Program in Indonesia (2016-2020)* yang ditulis oleh Haerani Destiningrum dan Witri Elvianti pada tahun 2023.¹⁴ Artikel tersebut menjelaskan bahwa kerjasama pembangunan antara Australia dan Indonesia melalui program MAMPU sebagai Instrumen Diplomasi Publik yang dilakukan dengan membentuk banyak program mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program ini dijalankan pada fase kedua periode 2016–2020 dan menjadi objek penelitian karena perannya tidak hanya dalam pembangunan sosial tetapi juga sebagai alat *public diplomacy* Australia di Indonesia.

Artikel ini membahas mengenai DFAT Australia dan pemerintah

¹⁴ Haerani Destiningrum dan Witri Elvianti. "Australian Government's Public Diplomacy through the MAMPU Program in Indonesia (2016-2020)." (jurnal hubungan internasional). 2023

Indonesia menginisiasi program-program kemitraan seperti Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan. Program pembangunan seperti MAMPU, bantuannya tidak hanya dilihat sebagai aliran sumber daya tetapi juga sebagai instrumen diplomatik untuk memperkuat citra dan hubungan bilateral. Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) telah berjalan selama 8 tahun (2012-2020) dan telah mencapai banyak target, termasuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Australia berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kontribusi artikel tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual yang konkrit tentang pemikiran yang dikemukakan oleh Zaharna yang mengklasifikasikan program bantuan pembangunan sebagai bagian dari strategi *public diplomacy* tingkat kedua yang berorientasi pada *relationship-building*. Pemberian bantuan melalui program MAMPU dirancang untuk menciptakan manfaat bersama antara Australia dan Indonesia, sehingga tidak hanya memperbaiki kondisi sosial tetapi juga memperkuat hubungan pemerintah kedua negara. Artikel tersebut juga memberikan data terkait banyaknya pihak pemerintah maupun NGO yang menjalin kerjasama dalam program MAMPU.

Program MAMPU yang dibagi menjadi dua fase dimana fase tahap I berlangsung dari tahun 2012 – 2016 dan Fase II di tahun 2016 – 2020 kemudian dilanjutkan dengan program *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* (AIPTIS) atau Inklusi di tahun 2021-2029. Setiap fase dalam program MAMPU dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh BAPPENAS dan DFAT pada November 2013 dan Januari 2017. Pada fase II

dana yang diberikan untuk pelaksanaan Program MAMPU berjumlah AUD \$55.500.000 oleh DFAT 2020.

Meskipun artikel tersebut relevan, terdapat perbedaan pada ruang lingkup penelitian dengan penelitian ini. Artikel tersebut membahas cakupan terkait diplomasi publik melalui program MAMPU. Sementara penelitian ini fokus spesifik pada program INKLUSI yang merupakan lanjutan dari program MAMPU pada level sub negara yaitu di daerah Sumatera Barat. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana implementasi kerjasama yang terjalin antara Australia dan Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga saat ini dianalisis hingga level daerah salah satunya provinsi Sumatra Barat.

Referensi kedua mengacu pada artikel jurnal yang berjudul *Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals*.¹⁵ Artikel yang ditulis oleh Putiviola Elian Nasir, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita Afriani Sinulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat dan Faraytodi Gibran ini menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi kontribusi sistem matrilineal Minangkabau terhadap pembangunan daerah di Sumatera Barat, khususnya target kesetaraan gender dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Artikel tersebut memberikan kontribusi penting untuk memahami nilai-nilai budaya matrilineal di Sumatera Barat dengan suku Minangkabau dapat berkontribusi pada pencapaian target kesetaraan gender di Sumatera Barat.

¹⁵ Putiviola Elian Nasir, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita Afriani Sinulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat dan Faraytodi Gibran. "Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals." (*Andalas Journal of International Studies* | Vol X No 1). 2021

Artikel tersebut mengidentifikasi Masyarakat Minangkabau yang tidak sepenuhnya menerapkan nilai-nilai matrilineal, secara tidak langsung telah menghambat ketercapaian kesetaraan gender di Sumatera Barat, terutama terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap wanita serta partisipasi aktif wanita dalam perekonomian dan perpolitikan. Dengan demikian, pada dasarnya kesadaran akan kesetaraan gender di Sumatera Barat ada. Namun, meskipun nilai-nilai budaya inti seperti kekerabatan matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu, peran perempuan dalam musyawarah mufakaik, dan warisan budaya tinggi yang diberikan kepada perempuan dalam keluarga dianggap sebagai sumber kekuatan, martabat, dan kekuatan bagi perempuan Minangkabau untuk memajukan diri mereka sendiri. Nilai utama lain yang tersembunyi di balik judul “matrilineal”, telah menutupi konsep ideal ini. Di Minangkabau seperti di banyak budaya lain, laki-laki dominan. Hal ini berdampak negatif terhadap kinerja wilayah dalam mencapai target kesetaraan gender TPB terkait penghapusan FGM, pengakuan dan apresiasi terhadap kerja tak berbayar perempuan dan pembagian kerja rumah tangga, partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik, serta hak yang sama untuk memiliki tanah.

Meskipun artikel tersebut memberikan perspektif teoritis yang kuat mengenai sistem matrilineal dalam TPB/SDGs di Sumatra barat. Pembahasannya cenderung bersifat normatif dan teoretis. Artikel tersebut belum banyak menguraikan contoh konkret implementasi strategi pembangunan berkelanjutan dalam konteks kebijakan atau program tertentu, khususnya pada level daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melengkapi perspektif teoretis tersebut dengan bukti empiris mengenai bagaimana nilai-nilai matrilineal pada dasarnya seharusnya membantu pembangunan berkelanjutan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini

menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Melalui pendekatan kolaboratif, Program *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* (INKLUSI) berupaya memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal termasuk perempuan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Terdapat perbedaan mendasar antara artikel tersebut dengan penelitian ini, meskipun keduanya menganalisis mengenai pembangunan di Indonesia. Artikel tersebut berfokus pada menilai kontribusi sistem matrilineal Minangkabau terhadap pembangunan daerah di Sumatera Barat. Sementara penelitian ini mengenai diplomasi publik negara melalui NGO yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu LP2M serta tantangan dan peluang dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, seperti keterbatasan kapasitas institusi lokal, dinamika sosial budaya masyarakat, serta keberlanjutan program setelah dukungan internasional berakhir.

Reverensi ketiga mengacu pada artikel jurnal yang berjudul *Kerja sama Indonesia - Australia melalui Program MAMPU Dalam Hal Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan* oleh Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura.¹⁶ Artikel tersebut mengkaji kerja sama Indonesia–

¹⁶ Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura. Kerja sama Indonesia - Australia melalui Program MAMPU Dalam Hal Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 4, 2022, hal 705-716

Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia) yang secara khusus diarahkan pada upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Program MAMPU merupakan bentuk kerja sama pembangunan bilateral yang bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan, khususnya perempuan miskin dan rentan, agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan dasar, kesempatan ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kedekatan langsung dengan komunitas akar rumput. Argumen pertama artikel adalah bahwa program MAMPU tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga pada perubahan struktural dan kultural yang selama ini menjadi penghambat tercapainya kesetaraan gender. Program ini mendorong advokasi kebijakan yang responsif gender, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, serta penguatan kapasitas organisasi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Artikel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Artikel tersebut juga memperkuat argumen bahwa kebijakan dan kerangka kerja sama di tingkat nasional serta peran aktor-aktor utama dalam pelaksanaan program kerjasama Indonesia dan Australia terutama MAMPU. Konsep *Women in Development* dalam artikel tersebut memvalidasi analisis ketertinggalan perempuan salah satunya karena para perempuan dapat dikatakan tidak berpartisipasi politik maupun pembangunan. Perspektif pada artikel tersebut memberikan konteks kerjasama bilateral yang digunakan suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan membuat hubungan baik dan jangka panjang antar negara yang bersangkutan.

Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan dalam isu kesetaraan gender, artikel tersebut lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan kerangka kerja sama di tingkat nasional serta peran aktor-aktor utama dalam pelaksanaan Program MAMPU dan dilanjutkan dengan program AIPTIS atau INKLUSI. Pembahasan mengenai implementasi program di tingkat daerah tertentu belum menjadi fokus utama, sehingga ruang lingkup analisisnya masih relatif makro.

Sementara penelitian ini mengkaji implementasi kerja sama Indonesia–Australia pada level lokal untuk melihat bagaimana kebijakan dan program tersebut berdampak langsung pada masyarakat.

Referensi keempat mengacu pada buku yang berjudul *Different Societies Shared Future Australia, Indonesia and The Region* yang ditulis oleh John Monfries.¹⁷ Buku tersebut menganalisis mengenai dinamika hubungan Australia dan Indonesia dalam konteks kawasan regional, dengan menekankan pentingnya saling pengertian, kepercayaan, dan kepentingan bersama sebagai fondasi utama kerja sama bilateral secara komprehensif. Buku tersebut memandang hubungan kedua negara sebagai hubungan yang kompleks namun saling membutuhkan, di mana perbedaan sistem politik, sosial, dan budaya tidak menjadi penghalang, melainkan tantangan yang harus dikelola melalui dialog dan kerja sama berkelanjutan. Dalam buku tersebut, kerja sama pembangunan diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Pada bagian bab ke dua dalam buku tersebut membahas mengenai *security aspects* dari hubungan Kerjasama Indonesia dan Australia. Keamanan

¹⁷ Monfries, John. *“Different Societies, Shared Futures: Australia, Indonesia and the Region.”* Singapore: ISEAS, 2006

tidak hanya diartikan dalam makna yang tradisional yang berfokus pada ancaman militer tetapi juga mengenai ketahanan sosial (*non traditional security*). Posisi geografis Indonesia yang strategis dan perannya sebagai negara kunci di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi Australia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. *Security aspects* yang dibahas dalam buku ini dapat dikaitkan dengan pendekatan *human security*, yaitu tentang keamanan yang berorientasi pada perlindungan individu dan masyarakat dari ancaman struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan marginalisasi.

Selain itu, buku ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai landasan konseptual dan teoritis dalam memahami hubungan Indonesia–Australia serta rasionalitas kerja sama pembangunan di tingkat regional. Perspektif pada buku tersebut memberikan konteks histori yang memperkaya pemahaman tentang rasionalitas dan arah kebijakan kerja sama jangka panjang di kawasan Indonesia dan Australia. Pendekatan makro dan regional yang terdapat dalam buku tersebut, menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah pelaksanaan program, peran aktor-aktor lokal, serta dampak program terhadap masyarakat sasaran di Sumatera Barat. Dengan demikian, buku ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana visi kerja sama dan kepentingan bersama yang dibahas secara konseptual dan diterjemahkan ke dalam praktik pembangunan di tingkat daerah.

Perbedaan utama antara artikel yang ada dalam buku tersebut dengan penelitian ini adalah kerja sama pembangunan diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Sementara penelitian ini mengenai kerja sama Indonesia–Australia melalui Program INKLUSI di Sumatera Barat mengkaji implementasi konkret hubungan bilateral tersebut pada tingkat lokal.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana diplomasi publik Australia melalui LP2M dalam menjalankan program INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) dijalankan sebagai bentuk kerja sama pembangunan yang bertujuan mendorong inklusi sosial, pemenuhan hak kelompok rentan, serta penguatan kapasitas institusi dan masyarakat lokal. Keterkaitan kedua kajian ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Australia tidak hanya bersifat strategis pada level negara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan inklusif di daerah. Buku tersebut memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menempatkan Program INKLUSI sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi kelima mengacu pada artikel jurnal yang berjudul Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*) Di Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 yang ditulis oleh Nala Nourma Nastiti dan Anggun Dwi Panorama.¹⁸ Artikel tersebut membahas mengenai pelaksanaan kerja sama bilateral Indonesia–Australia dalam kerangka INKLUSI yang bertujuan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemenuhan hak kelompok rentan. Fokus kajian dalam artikel ini diarahkan pada proses implementasi program di tingkat daerah, termasuk peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta tantangan yang dihadapi dalam menerjemahkan kebijakan kerja sama internasional ke dalam praktik pembangunan lokal.

¹⁸ Nala Nourma Nastiti dan Anggun Dwi Panorama. Implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Aiptis (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*) Di Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol 9 No 2. 2024

Kontribusi artikel ini dalam penelitian ini adalah program INKLUSI yang membahas cakupan isu yang lebih luas serta pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan, advokasi, dan penguatan kapasitas aktor lokal. Penelitian ini menekankan bagaimana kerja sama bilateral Indonesia–Australia diwujudkan melalui program yang berorientasi pada perubahan sistemik, termasuk penguatan kebijakan daerah dan peningkatan kolaborasi multipihak dalam mendukung pembangunan inklusif di Sumatera Barat. Artikel ini memberikan gambaran empiris awal mengenai implementasi kerja sama Indonesia–Australia dalam mendorong inklusi sosial di tingkat daerah.

Meskipun artikel ini memberikan pemahaman mengenai dinamika kerja sama Indonesia–Australia, terdapat perbedaan mendasar terkait subjek dari artikel ini mengenai peningkatan kapasitas lembaga publik (Pemerintah Daerah, LSM) untuk mendukung isu-isu inklusif, sementara penelitian ini fokus langsung pada penguatan hak-hak dasar masyarakat adat dan desa di Sumatera Barat. Selain itu artikel ini menjelaskan masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidaksetaraan gender yang terkait dengan struktur sosial dan budaya, serta kurangnya implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan secara efektif. Selain itu, ketimpangan ini memperburuk masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan eksklusi sosial. Sementara penelitian ini alah lebih spesifik membahas masalah upaya Australia dan LP2M selaku LSM dalam ranah pembangunan melalui program INKLUSI berupa pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di Sumatera Barat.

Dari kelima artikel jurnal diatas, kerjasama Pembangunan Indonesia dan Australia telah berlangsung sangat lama dan terbukti menjadi hubungan geopolitik dan sosial yang secara factual merestrukturisasi tatanan global. Australia sebagai negara donor dan mitra terdekat bagi Indonesia memiliki

komitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Program INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*) merupakan kerja sama Indonesia dan Australia dengan tujuan utama meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inklusif.

Buku yang ditulis oleh John Monfries, kerangka *security aspect* dan konsep *women in development*, serta perspektif diplomasi publik secara kolektif memperkuat argument bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia ketika dianalisis melalui kacamata diplomasi publik merupakan teori yang koheren dan jangka panjang terhadap peran Australia dalam pembangunan di Indonesia. Penelitian ini dengan fokus dan eksklusif pada program dan upaya kerjasama pembangunan yang dilakukan Australia dan Indonesia melalui program INKLUSI di level daerah Sumatera Barat yang direpresetasikan oleh LP2M sebagai bentuk diplomasi publik dalam sistem matrilineal di kabupaten Padang Pariaman yang dapat mengisi celah literatur sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan mengenai dampak atau efektifitas program lanjutan lainnya dari hasil kerjasama Australia dan Indonesia dalam aspek pembangunan kesetaraan gender dan kelompok rentan di daerah lainnya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1. Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan konsep yang telah digunakan lebih dari lima puluh tahun dan memiliki perkembangan sepanjang periode tersebut. Diplomasi publik diperkenalkan sebagai instrumen diplomasi baru yang berbeda dari diplomasi tradisional karena secara khusus menargetkan publik. Konsep ini berkembang menjadi “diplomasi publik baru” sebagai respon dari adanya perubahan lingkungan sosial, politik domestik maupun internasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi, penguatan sistem

demokrasi, serta kemajuan teknologi.¹⁹ Konsep diplomasi publik berkembang dan banyak digunakan oleh akademisi sebagai aktivitas yang dilakukan negara terhadap publik di negara lain sebagai upaya dalam mewujudkan kerjasama atau membangun hubungan.²⁰ Pada saat kemunculan diplomasi publik merupakan tanggung jawab seorang diplomat. Namun seiring perubahan zaman banyak aktor-aktor lain yang mulai hadir dan terlibat dalam pelaksanaan diplomasi publik.²¹ Secara garis besar terdapat dua definisi diplomasi publik, pertama terdapat perbedaan diplomasi publik dan diplomasi tradisional dimana diplomasi publik dipandang sebagai interaksi resmi yang berpusat pada negara, yaitu hubungan pemerintah dengan publik, yang berkaitan dengan hasil kebijakan luar negeri suatu negara.²² Sedangkan definisi kedua mengakui bahwa adanya aktor-aktor baru selain negara, keragaman tujuan, aktivitas dan strategis yang lebih luas dalam apa yang disebut sebagai “diplomasi publik baru”.²³

Salah satu definisi yang mewakili diplomasi publik baru adalah Bruce Gregory yang lebih komprehensif membahas keberadaan aktor serta tujuan baru. Menurut Gregory diplomasi publik dipandang sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh negara, asosiasi antarnegara, serta beberapa aktor sub-negara dan non-negara untuk memahami budaya, sikap, dan perilaku, membangun dan mengelola hubungan serta memengaruhi pemikiran dan memobilisasi tindakan guna memajukan kepentingan dan nilai-nilai mereka.²⁴

¹⁹ Fitzpatrick, K. R. 2012. “Defining Strategic Publics” in a Networked World: Public Diplomacy’s Challenge at Home and Abroad. *The Hague Journal of Diplomacy* 7(4):421-440.

²⁰ Jan Melissen, “The New Public Diplomacy : Between Theory and Practice.,” in *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

²¹ N. Cull, “The Tightrope to Tomorrow: Reputational Security, Collective Vision and the Future of Public Diplomacy,” in *Debating Public Diplomacy Now and Next* (Leiden: Brill, 2019).

²² McPhail, T. L. 2011. *Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends*. Wiley.

²³ Melissen, J. 2005b. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York, NY: Palgrave Macmillan.

²⁴ Gregory, B. 2011. “American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation.” *The Hague Journal of Diplomacy* 6(3):351-372.

Dalam menganalisis aktivitas diplomasi publik yang berkembang Bruce Gregory menjelaskan dalam suatu pelaksanaan diplomasi publik terdapat empat aktivitas diplomasi publik yaitu *understanding, planning, engagement, and advocacy*.²⁵ Keempat tahapan ini mampu menjelaskan kegiatan diplomasi publik dari aktor negara, sub-negara, hingga aktor non negara. Adanya konsep diplomasi publik yang Gregory bentuk mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih atas perdebatan terhadap kegiatan diplomasi publik. Aktivitas yang dimaksud Gregory adalah metode, alat, sumber daya, arah strategi, struktur organisasi, identitas dan peran praktisi, dan peran publik dalam menjalankan diplomasi. Adapun empat tahapan yang dijelaskan Gregory dapat dijabarkan seperti berikut.

1. *Understanding*

Pada tahap ini diplomasi publik menekankan pemahaman internal dan eksternal sebagai dasar efektivitas strategi. Secara internal, aktor diplomasi perlu memahami pola komunikasi dan menyelaraskan kata dengan tindakan agar program yang dilaksanakan memiliki nilai komunikatif yang konsisten. Bruce Gregory menjelaskan bahwa negara dalam menjalankan diplomasi publik harus mampu memahami dirinya sendiri. Secara eksternal, pemahaman dilakukan melalui kegiatan *listening*, riset opini, intelegen untuk mengetahui budaya, sikap, dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan relevansi dan dampak program.

2. *Planning*

Pada tahap ini Gregory menjelaskan bahwa adanya serangkaian tindakan jangka panjang di mana terdapat perencanaan strategis yang meliputi pengembangan kebijakan, koordinasi aktor, kerja sama dengan masyarakat

²⁵ Bruce Gregory, "American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation," *The Hague Journal of Diplomacy* 6, nos. 3–4 (March 2011): 351–72, <https://doi.org/10.1163/187119111X583941..>

sipil, dan evaluasi program. Tujuannya memajukan kepentingan publik dan hubungan diplomatik berbeda dari sektor lain. Selain itu di bagian ini juga langsung menyinggung terkait proses pelaksanaan program INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*). Perencanaan jangka panjang negara kepada publik di negara target. Tantangan yang biasanya terdapat pada aktivitas ini terdapat pada strategi multi-pemangku kepentingan menjadi keputusan nyata terkait institusi, metode, dan prioritas.

3. *Engagement*

Pada tahap ketiga adalah kegiatan diplomasi publik yang penting, pada tahapan ini negara membentuk hubungan tanpa adanya tujuan politik. Negara dan NGO terlibat aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas negara. Negara dapat melakukan aktivitas diplomasi publik melalui dialog untuk membentuk hubungan seperti keterlibatan aktif dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan publik global untuk membangun kepercayaan, hubungan, dan pemahaman bersama. Efektivitasnya bergantung pada kesetaraan, tujuan bersama, dan keberlanjutan interaksi, serta memiliki dimensi politik dan partisipasi warga yang membawa kepentingan dan identitas sendiri. Kendala pada aktivitas ini meliputi akuntabilitas, legitimasi, dan batas antara diplomasi publik dan internasionalisme budaya.

4. *Advocacy*

Pada tahap ini diplomasi publik menekankan penggunaan komunikasi strategis untuk memengaruhi pemikiran dan perilaku pihak lain demi kepentingan aktor, sekaligus mendukung kepentingan bersama bila memungkinkan. Berbeda dengan *engagement* yang menekankan dialog dan pemahaman bersama, *advocacy* fokus pada aksi strategis, persuasi, mobilisasi, dan penyampaian informasi melalui pidato, tindakan, dan citra yang memadukan akal dan emosi atau media lainnya. Efektivitasnya bergantung

pada konteks situasional, teknologi, dan kesesuaian metode, serta harus diseimbangkan dengan harapan publik dan kapasitas untuk merealisasikan tujuan.

Dari sejumlah konsep yang dijelaskan oleh Bruce Gregory dapat disederhanakan dalam bentuk tabel yang berisikan poin-poin penting sebagai berikut:

Table 1.2 Diplomasi Publik

Diplomasi publik (Bruce Gregory)	Defenisi	Aspek
<i>Understanding</i>	Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan secara memahami bagian internal dan eksternal dalam sebuah strategi	1. Adanya pemahaman negara terhadap dirinya. 2. Adanya kemampuan negara memahami tergetnya. 3. Adanya kemampuan negara memahami program yang dilaksanakan.
<i>Planning</i>	Aktivitas diplomasi publik dilakukan secara monolog dengan merencanakan, strategi, fungsi yang nantinya berguna untuk mencapai tujuan	1. Fungsi strategis dan kebijakan. 2. Koordinasi dan manajemen aktor 3. Menjalin kerjasama dengan aktor non negara atau masyarakat sipil.
<i>Engagement</i>	Aktivitas diplomasi publik dilakukan secara dialog dengan memanfaatkan jaringan yang ada untuk membentuk satu pemahaman	1. Komunikasi secara dialog. 2. Pemamfaatan hubungan jaringan. 3. Pembentukan pemahaman dan nilai yang sama.
<i>Advocacy</i>	Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan secara monolog dengan membentuk pemahaman demi tujuan sendiri	1. Komunikasi secara monolog. 2. Penggunaan media. 3. Mempromosikan kepentingan sendiri.

Sumber : Bruce Gregory (2011)

Keempat tahapan diplomasi publik diatas yang dijelaskan oleh Bruce Gregory merupakan cara bagi para aktor melaksanakan aktivitas diplomasi publik dalam membentuk pemahaman bagi negara lain. Setiap tahapan berbeda

dalam pelaksanaannya dan kategorinya. *Understanding* digunakan oleh aktor untuk memahami sumber daya dan negara lain sebagai tujuannya. *Planning* merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya di tahapan ini telah menentukan tujuan pelaksanaan diplomasi publik. Nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk *engagement* dan *advocacy*.

Kedua aspek terakhir menjadi aspek penting dalam pelaksanaan diplomasi publik dengan cara yang berbeda. Dalam konteks ini, *Understanding* digunakan sebagai cara Australia dalam memahami keadaan masyarakat di Indonesia dan adaptasi LP2M dalam implementasi program INKLUSI dalam budaya matrielinial di kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat. *Planning* sebagai rancangan program APTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) yang dilakukan LP2M di Padang Pariaman. Dan *engagement* dan *advocacy* sebagai pelaksanaan diplomasi publik Australia melalui LP2M dalam pelaksanaan program INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) di Padang Pariaman.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam memecahkan masalah secara sistematis. Dalam menemukan pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis ini diiringi dengan adanya pemilihan metode dan teknik yang tepat dalam menggunakannya. Ibarat seorang arsitek yang ingin mendesign suatu bangunan dibutuhkan sejumlah alat, ukuran, perhitungan, lokasi dari pintu yang tepat. Oleh karena itu metode penelitian penting bagi pelaksanaan penelitian sebagai dasar fondasi dasar dari penelitian tersebut. Tujuannya agar memastikan penelitian yang dilakukan punya dasar kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁶ Dalam studi hubungan

²⁶ Thuan Nguyen, *Research Methodology: An Introduction*.

internasional metodologi penelitian merujuk pada sistem dan ide yang koheren, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memperoleh informasi melalui struktur penyelidikan logis. Peran metodologi penelitian amat penting dalam studi hubungan internasional, perannya sebagai panduan yang menuntun peneliti dalam pemecahan masalah yang ditemukan.²⁷

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Lexy.J Moleong, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari tulisan, lisan, maupun dokumen-dokumen dari objek yang diamati.²⁸ Dalam penelitian ini turut menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, menurut J. Supranto dalam buku metode penelitian *Public Relations* dan komunikasi, studi pustaka adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²⁹ Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat menganalisis data dari sumber informasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis.

Menurut Mardalis, penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variable-variabel yang ada¹⁸. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk mengkaji secara mendalam diplomasi publik Australia melalui

²⁷ Thuan Nguyen, *Research Methodology: An Introduction*.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

²⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 81.

Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) di Padang Pariaman.

1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis diplomasi publik Australia melalui LP2M dalam implementasi program *Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society* (INKLUSI) di kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 hingga 2026. Periode ini dipilih karena menandai program INKLUSI mulai dilaksanakan di Padang Pariaman dari tahun 2023 hingga saat ini. Fokus penelitian diarahkan pada instrumen-instrumen diplomasi publik Australia terkait bantuan program pembangunan khususnya pemberdayaan perempuan di kabupaten Padang Pariaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan usia dibawah 19 tahun sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender yang menjadi salah satu fokus program INKLUSI. Australia sebagai negara donor yang berinvestasi secara besar untuk melakukan diplomasi publik dalam dominasi sektor pembangunan. Penelitian ini menganalisis bagaimana interaksi dan kerjasama yang terjalin antara DFAT Australia, LP2M, Dinas Sosial di Sumatera Barat dengan kombinasi instrumen diplomasi publik untuk mencapai tujuan masyarakat yang inklusif.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis menurut John W. Creswell dan David Craswell adalah entitas utama yang dianalisis dalam sebuah penelitian, yang mana dapat berupa individu, kelompok, artefak, wilayah geografis atau entitas sosial lainnya yang menjadi sumber informasi selama pengumpulan data. Unit eksplanasi menurut Gary Goertz adalah faktor atau mekanisme kausal yang menjelaskan variasi dalam variable dependen, berfungsi sebagai kekuatan penggerak *driving force* yang menghasilkan *outcome* yang diamati dalam penelitian ini. Unit analisis

dari penelitian ini adalah Australia yang melakukan diplomasi publik melalui Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) terutama program AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*) di Padang Pariaman.

Sedangkan, unit eksplanasi merupakan objek yang akan mempengaruhi perilaku unit analisis, yang mana unit eksplanasi dari penelitian ini adalah *value* atau citra pembangunan inklusivitas Australia, bantuan program pembangunan, kondisi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami pernikahan dini dan berada di dalam sistem matrilineal. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka pengaruh diplomatik dan *soft power* Australia melemah, stabilitas sosial dan ekonomi kawasan terganggu, kemudian Australia akan mengalami kerugian reputasi sebagai negara donor internasional dan kebijakan luar negeri Australia tidak tercapai.

Program INKLUSI yang menjadi bukti konkrit terkait hubungan kedua aktor negara dan aktor non negara seperti LP2M dalam melakukan diplomasi publik. Penelitian ini berjudul diplomasi publik Australia melalui LP2M di Padang Pariaman. Maka, penulis menggunakan tingkat analisis yaitu sistem *international level*. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level sub internasional (*international level*) yang berkaitan hingga ke *level sub-national*, karena penelitian berfokus pada interaksi diplomasi publik Australia melalui LP2M terutama dalam implementasi kerja sama internasional Program INKLUSI pada masyarakat di Padang Pariaman.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar,

dokumen resmi yang diterbitkan maupun dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

2. Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti, sejalan dengan penugasan yang penulis alami.
3. Wawancara. Peneliti mewawancarai informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga tercipta suasana tanya jawab yang dapat menggali semua informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Pada tingkat analisis data sebagai proses yang melalui serangkaian inferensi induktif yang berurutan. Aktivitasnya meliputi pengumpulan data, membandingkan data untuk menemukan pola dan keteraturan, mencari data tambahan untuk memvalidasi pola tersebut, hingga menarik kesimpulan dari hubungan antara data dengan konsep yang digunakan. Terkhusus dalam penelitian ini metode yang digunakan berfungsi dalam mengelola data dalam menjelaskan bagaimana diplomasi publik Australia melalui LP2M di Padang Pariaman. Aktivitas ini kemudian dijabarkan oleh J. W. Creswell kedalam enam bentuk aktivitas yaitu: Persiapan dan pengaturan data, membaca dan eksplorasi data, pengkodean (*coding*) data, pengembangan tema atau deskripsi, representasi atau pelaporan temuan dan validasi hasil penelitian (cek keakuratan).³⁰

1. Persiapan dan pengaturan data

Peneliti perlu mempersiapkan dan mengatur data untuk analisis. Proses ini melibatkan menyimpan dan menyalin data dan memutuskan apakah data dianalisis dengan tangan atau komputer. Langkah berikutnya adalah untuk

³⁰ Creswell, J.W. Educational Research Fourth Edition. 2020. Boston: Pearson Education

mengeksplorasi data dan kode. Hal ini melibatkan membaca *database* dan kemudian menerapkan langkah-langkah yang terlibat dengan *coding*. Langkah-langkah ini untuk mengidentifikasi segmen teks dan kemudian untuk menetapkan label kode ke segmen berdasarkan makna peneliti melihat segmen teks.

Kode ini kemudian digunakan dalam membentuk gambaran tentang fenomena pusat atau dari konteks (atau pengaturan) peneliti. Kode juga dikelompokkan bersama untuk membentuk tema yang lebih luas yang digunakan dalam penelitian sebagai temuan kunci. Dari analisis ini, peneliti mewakili data dalam temuan melalui angka, tabel, peta, dan diskusi rinci tema. Representasi ini kemudian menginformasikan interpretasi yang lebih luas dari temuan, dan ini dibahas sebagai kesimpulan umum dan dibandingkan dengan literatur yang ada. Kesimpulan ini peneliti yang juga menyampaikan keterbatasan penelitian serta penelitian masa depan. Hal ini penting juga untuk memvalidasi keakuratan temuan melalui beberapa strategi seperti memeriksa anggota dan triangulasi.

2. Membaca dan Eksplorasi Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, manajemen data awal terdiri dari pengorganisasian data, menyalin wawancara dan catatan lapangan mengetik, dan membuat keputusan untuk menganalisa data dengan tangan atau dengan komputer. Beberapa program perangkat lunak yang baik yang tersedia untuk analisis komputer.

3. Pengkodean (*coding*) data

Analisis utama data kualitatif terdiri dari pengkodean data. Proses pengkodean adalah salah satu mengurangi teks atau database gambar untuk deskripsi tions dan tema orang, tempat, atau peristiwa. Ini melibatkan memeriksa baris demi baris teks database, menanyakan diri sendiri apa yang

dikatakan peserta, dan kemudian menetapkan label kode ke segmen teks.

4. Pengembangan tema atau deskripsi

Coding membangun deskripsi dan tema kode tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan deskripsi orang dan tempat. Mereka juga digunakan untuk mengembangkan tema yang menyajikan abstraksi yang lebih luas dari kode. Tema-tema ini mungkin berlapis atau terorganisir untuk menceritakan sebuah cerita, atau mereka juga dapat saling berhubungan untuk menggambarkan kompleksitas fenomena tersebut.

5. Representasi atau Pelaporan temuan

Melaporkan temuan dalam diskusi narasi yang terdiri dari berbagai bentuk, seperti kronologi, pertanyaan, atau komentar tentang perubahan bahwa pengalaman peserta. Menafsirkan Temuan Dari pelaporan dan mewakili temuan, peneliti kualitatif membuat inter-penafsiran mengenai arti dari penelitian. Penafsiran ini terdiri dari memajukan personal dilihat dengan membuat perbandingan antara temuan dan literatur, serta menyarankan keterbatasan dan penelitian di masa depan.

6. Validasi Akurasi Temuan

Dalam memastikan ketepatan hasil penelitian, peneliti kualitatif sering menggunakan berbagai prosedur validasi, seperti pemeriksaan anggota, triangulasi, dan audit. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan penelitian memiliki tingkat keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk validasi dilakukan melalui triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk memastikan konsistensi data.

Dengan menggunakan teknis analisis data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis terkait

diplomasi publik Australia melalui LP2M di Padang Pariaman.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II : AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP TOWARDS AN INCLUSIVE SOCIETY (INKLUSI)

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh terkait kebijakan luar negeri Australia dalam bidang kerjasama pembangunan internasional yang menjadi dasar terbentuknya melalui program INKLUSI (*Australia-Indonesia Partnership Towards An Inclusive Society*). Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia, khususnya dalam upaya mendorong pembangunan yang inklusif melalui kemitraan pembangunan. Bab ini juga menguraikan tujuan, prinsip dan mekanisme pelaksanaan program INKLUSI, serta keterlibatan berbagai aktor dalam implementasinya, termasuk kerjasama yang terjalin hingga tingkat lembaga lokal yaitu LP2M. Selain itu, pembahasan terkait kerjasama pembangunan, inklusi sosial, pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender juga mendukung pembahasan pada bab ini.

BAB III : IMPLEMENTASI PROGRAM INKLUSI OLEH LP2M DI PADANG PARIAMAN

Bab ini menjelaskan gambaran empiris permasalahan mengenai keadaan inklusivitas sosial di Padang Pariaman khususnya terkait akses, partisipasi, dan perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Pembahasan mencakup

berbagai dinamika sosial dan interaksi antar aktor dayang terlibat dalam proses diplomasi publik Australia di Padang Pariaman.

BAB IV : ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK AUSTRALIA MELALUI LP2M DI PADANG PARIAMAN TAHUN 2023-2026

Pada bab ini penulis akan membahas terkait analisis diplomasi publik Australia melalui kerjasama dengan LP2M di Padang Pariaman pada periode 2023-2026. Analisis difokuskan pada bagaimana Australia memanfaatkan program INKLUSI sebagai instrumen diplomasi publik untuk mencapai kepentingan Australia. Bab ini juga membahas peran LP2M sebagai mitra pelaksana dalam menjembatani tujuan dan nilai-nilai yang diusung Australia kepada masyarakat sasaran serta menganalisis bentuk, strategi, dan efektivitas diplomasi publik yang dijalankan. Dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi publik bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kerja sama tersebut berkontribusi terhadap pembentukan citra positif Australia sekaligus memperkuat hubungan Australia dan Indonesia di tingkat masyarakat lokal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis, menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi akademik dan praktis, baik bagi pembuat kebijakan maupun penelitian selanjutnya.